

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian manajemen yang berisi rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter. Anggaran merupakan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja. Menurut Mulyadi (2001), anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (Programming). Untuk menjamin terlaksananya program tersebut, manajemen menyusun anggaran yang berisi rencana kerja tahunan dengan taksiran nilai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut.

Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di pemerintah daerah karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan-aturan mengenai anggaran terkait dengan kinerja pemerintah daerah pada saat ini telah berubah dengan turunnya beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan.

Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut diantaranya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Sebelum UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terlebih dahulu telah terbit paket UU tentang Keuangan Negara dan daerah yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Daerah, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Terbitnya aturan–aturan baru di atas beserta produk pelaksanaannya mengakibatkan perubahan yang sangat krusial di dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah dari mekanisme sentralisasi ke dalam mekanisme desentralisasi di mana pertanggungjawaban keuangan daerah lebih ditekankan pada konsep penganggaran kinerja atau berdasarkan prestasi kerja.

BPKA Kota Padang sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan keuangan daerahnya, dalam mewujudkan suatu manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna serta bebas dari KKN dengan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tujuan agar setiap isu strategis merupakan tuntutan dari masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dapat dipenuhi. Pelaksanaan anggaran tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya perencanaan anggaran yang cukup matang dan terarah.

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen publik (public management reform) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan reformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran

tradisional (traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget).

Untuk memenuhi pelaksanaan otonomi dibidang keuangan daerah dengan terbitnya peraturan pemerintahan yang baru tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang mampu menyusun APBD berbasis kinerja. Maka dalam rangka memenuhi keingintahuan penulis dan untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi berupa tugas akhir / laporan magang penulis akan membahas lebih lanjut mengenai Anggaran Berbasis Kinerja dengan judul ***“Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu :

- a. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran berbasis kinerja dan bagaimana metode penyusunan anggaran berbasis kinerja?
- b. Apa saja yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari anggaran berbasis kinerja?
- c. Bagaimana sistem anggaran berbasis kinerja dan elemen – elemen apa saja yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja?

1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

1.3.1 Tujuan Magang

Kuliah Kerja Lapangan / Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Dimana tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah :

1. Mahasiswa mampu memahami bagaimana Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dan elemen – elemen apasaja yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.
2. Mengkaji Apa saja yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari anggaran berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang dan Ketersesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa mengetahui bagaimana sistem anggaran berbasis kinerja serta bagaimana pengimplementasian penganggaran berbasis kinerja oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

1.3.2 Manfaat Magang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang sebagai masukan untuk Menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dapat menilai pengaruhnya terhadap kinerja manajerial atas Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Dengan adanya penilaian ini maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang dapat melakukan perbaikan

dan perubahan dalam penyusunan anggaran dan meningkatkan kinerja manajerial masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- 2) Bagi penulis, hasil penelitian ini bisa menambah wawasan sehingga lebih mengetahui lagi mengenai Perenapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja serta mengetahui juga mengenai bagaimanapengimplementasian Sistem Anggaran Berbasis Kinerja oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan kajiann lebih lanjut untuk pemerintah daerah lain.

1.4 Metodologi Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan laporan tentang **Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.**

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan pengamatan langsung ke subjek penelitian, meminta dan wawancara dengan petugas atau pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

b. Studi Pustaka

Studi ini dilakukan untuk memperoleh landasan – landasan teori dari buku – buku,majalah dan publikasi berupa bahan – bahan

kuliah dan artikel lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan laporan magang ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam proses penulisan laporan ini penulis membuat sistematika laporan agar penulisan laporan lebih terarah dalam pembuatannya, yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab pembahasan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam menulis laporan ini adalah:

BAB I :Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, batasan/ruang lingkup masalah, maksud dan tujuan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tentang sumber informasi yang mendukung penyusunan laporan, serta landasan yang digunakan dalam penyusunan laporan, diantaranya Landasan Teori dan Landasan Hukum.

BAB III: Gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dan Bentuk Kegiatan Magang

Menjelaskan tentang sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, struktur organisasinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, dasar hukum dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, bentuk aktifitas yang dilakukan selama magang pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, kendala yang dihadapi serta rencana kegiatan yang dikerjakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

BAB IV: Pembahasan

Pada pembahasan berisikan tentang uraian mengenai Penyusunan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, dan Apasaja keunggulan dan kelemahan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, Serta Mengkaji Pengimplementasian Sistem Anggaran Berbasis Kinerja oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

BAB V:Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada pemahaman teori serta membandingkan pembahasan dengan apa yang telah diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

